BAB IV
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI REALISASI ANGGARAN

4.1 Sistem Informasi Akuntansi Yang Diusulkan

4.1.1 Kebijakan Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Aggaran dan Pengendalian Intern Yang Diusulkan

Pada Kantor Kecamatan Rancasari, Sub Bagian Program dan Keuangan ada beberapa kebijakan yang diusulkan berkaitan dengan Realisasi Anggaran, dan secara umum sesuai dengan yang berjalan, dan yang termasuk kedalam usulan penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Rancangan DPA berisi sasaran yang hendak dicapai, program kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

B. Kode Rekening (kegiatan) sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah.

C. Transaksi pencairan dana akan dicatat kedalam ketika laporan realisasi anggaran telah dicatat pada SP2D.

D. Laporan pertanggungjawaban harus wajar dan tepat waktu.

E. Semua pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan akan dipertanggungjawabkan seluruhnya.

F. Adapula usulan tentang pengendalian intern, penulis mengusulkan bahwa dokumen-dokumen yang melalui verifikasi akan diminimalisir, karena menghambat alur dokumen, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk

melakukan proses pembuatan realisasi anggaran dapat lebih efektif dan efesien.

G. PPTK yang sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran.

4.1.2 Fungsi Yang Terkait Yang Diusulkan

Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi realisasi anggaran pada Kantor Kecamatan Rancasari, Sub Bagian Program dan Keuangan tidak berbeda jauh dengan yang berjalan, fungsi yang terkait sudah menjadi ketetapan pemerintah.

4.1.3 Formulir/Dokumen Yang Diusulkan

Formulir atau dokumen dalam sistem informasi akuntansi laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Rancasari, Sub Bagian Program dan Keuangan juga tidak ada perubahan, karena semua sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang semuanya memiliki dasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.4 Catatan Yang Diusulkan

Catatan yang diusulkan dalam sistem informasi akuntansi laporan keuangan pada kantor kecamatan rancasari, Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:

A. Jurnal Umum

B. Buku Besar

C. Laporan Realisasi Anggaran.

4.1.5 Nama Akun dan Kode Akun Yang Diusulkan

Kode Rekening yang diusulkan semua sesuai dengan PERMENDAGRI No.13 dan kode akun yang menyesuaikan dengan kecamatan setempat, serta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Kode Rekening yang diusulkan

Code Account	***Account***
Kas Bendahar Pengeluaran	1.1.1.01.01
R/K Pusat	2.1.1.01.01
Belanja Gaji Pokok	5.1.1.01.01
Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02
Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03
Tunjangan Beras	5.1.1.01.06
Belanja Telepon	5.2.2.03.01
Belanja Air	5.2.2.03.02
Belanja Listrik	5.2.2.03.03
Belanja ATK	5.2.2.01.01
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.2.2.01.03
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.2.15.02

4.2 Perancangan Model Sistem Yang Diusulkan

Pada bab ini penulis akan memberikan usulan pada rancangan sistem informasi akuntansi realisasi anggaran yang berjalan, sistem yang diusulkan merupakan sistem secara terkomputerisasi dan sistem yang diusulkan tersebut diharapkan dapat lebih membantu dan mempermudah saat memasukkan data transaksi dan pembuatan laporan realisasi anggaran bisa lebih akurat. Sehingga waktu yang digunakan bisa efektif dan efisien.

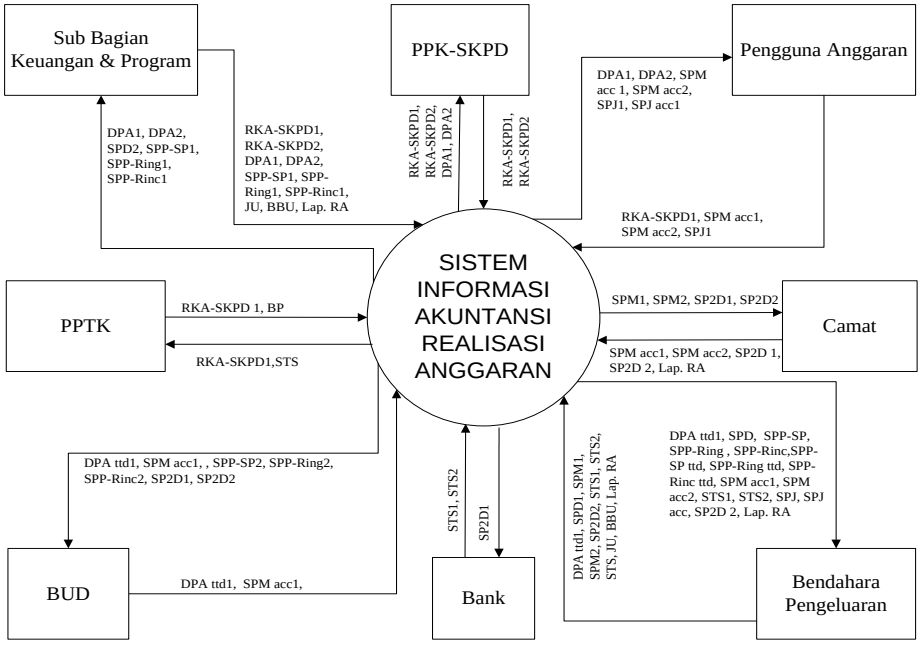
Tabel 4.2 Perbandingan Sistem yang Berjalan dan Sistem yang Diusulkan

No	Penjelasan	Sistem yang Berjalan	Sistem yang Diusulkan
1	Sistem Informasi Akuntansi	Siklus Akuntansi dimulai dari terjadinya kegiatan sampai pembuatan laporan, sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahaan tapi belum maksimal.	Penulis akan membuat jurnal umum, yang di sesuaikan dari kegiatan,dan transaksi kemudian membuat buku besar, dan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran.
2	Catatan Yang Digunakan	Catatan yang digunakan perusahaan diantaranya yaitu RKA-SKPD, DPA, LRA.	Catatan yang diusulkan: 1. Jurnal Umum 2. Buku Besar 3. Laporan Realisasi

4.2.1 Diagram Alur Data (*Data Flow Diagram)* Yang Diusulkan

4.2.1.1 Diagram Konteks yang Diusulkan

Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan sistem dan lingkungan luar yang saling berhubungan. Diagram konteks sebagai transformasi suatu sistem yang dapat mentransformasikan *data flow input* menjadi *output.* Diagram konteks usulan dapat dlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Diagram Konteks Diusulkan

Keterangan:

RKA : Rencana Kerja Anggaran

DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPD : Surat Penyediaan Dana

SPP-SP : Surat Perintah Pembayaran-Surat Pengantar

SPP-Ring : Surat Perintah Pembayaran-Ringkasan

SPP-Rinc : Surat Perintah Pembayaran-Rincian

SPM : Surat Permintaan Membayar

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

STS : Surat Tanda Setoran

BP : Bukti Pembayaran

SPJ : Surat Pertanggung Jawaban

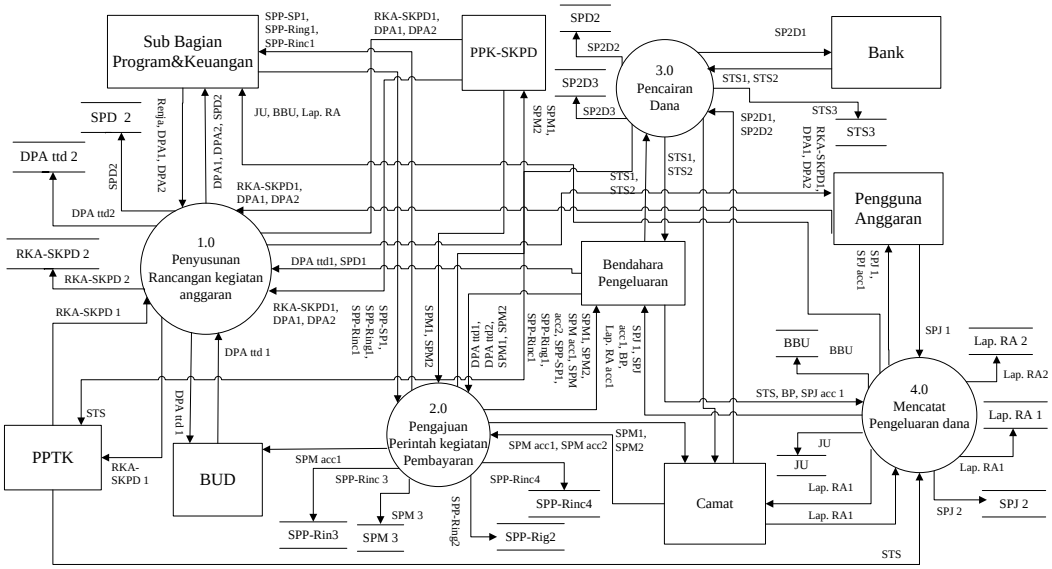
JU : Jurnal Umum

BBU : Buku Besar Umum

Lap. RA : Laporan Realisasi Anggaran

4.2.1.2 *Data Flow Diagram* Level 0 sistem yang Diusulkan

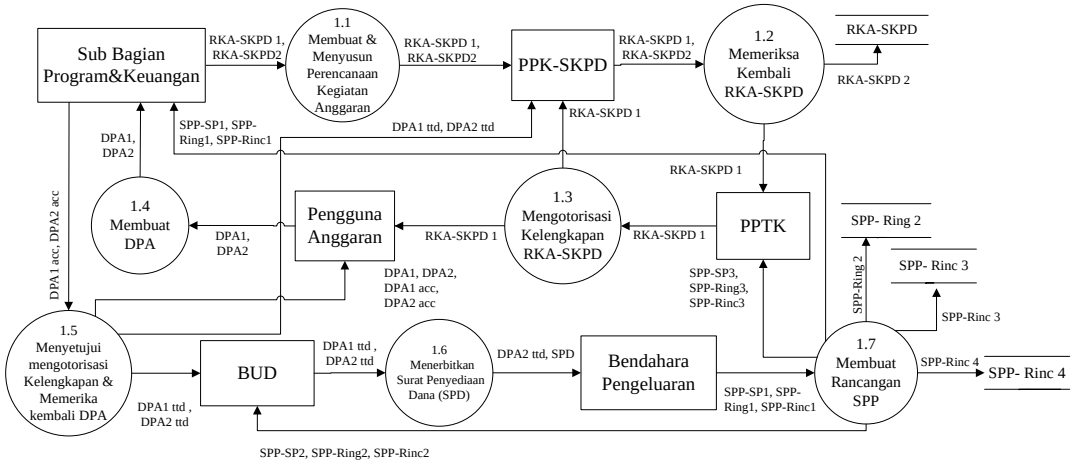
Data flow diagram level 0 yang diusulkan diantaranya meliputi penggambaran tentang proses perencanaan anggaran, pengajuan dana, realisasi dan pelaporan, seperti yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2 *Data Flow Diagram* Level 0 sistem diusulkan

4.2.1.3 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 1 sistem yang Diusulkan

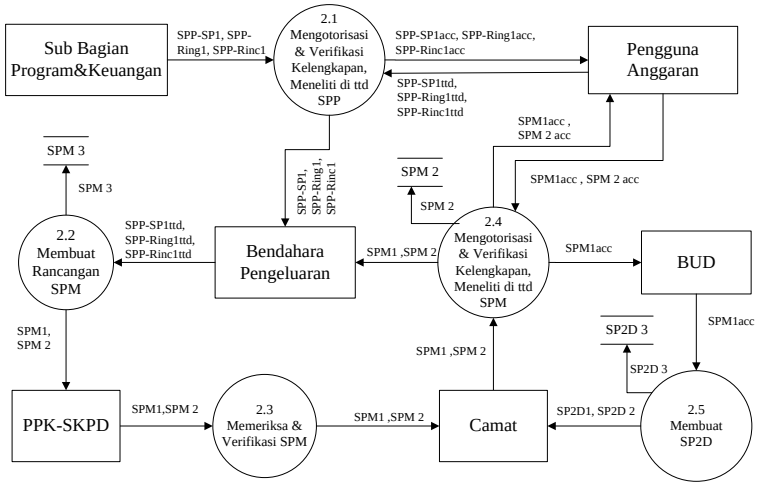
Data flow diagram level 1 yang diusulkan diantaranya meliputi penjabaran tentang proses pengajuan dana yang meliputi pembuatan SPP, SPM, dan otorisasi SP2D, seperti yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 1 sistem diusulkan

4.2.1.4 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 2 sistem yang Diusulkan

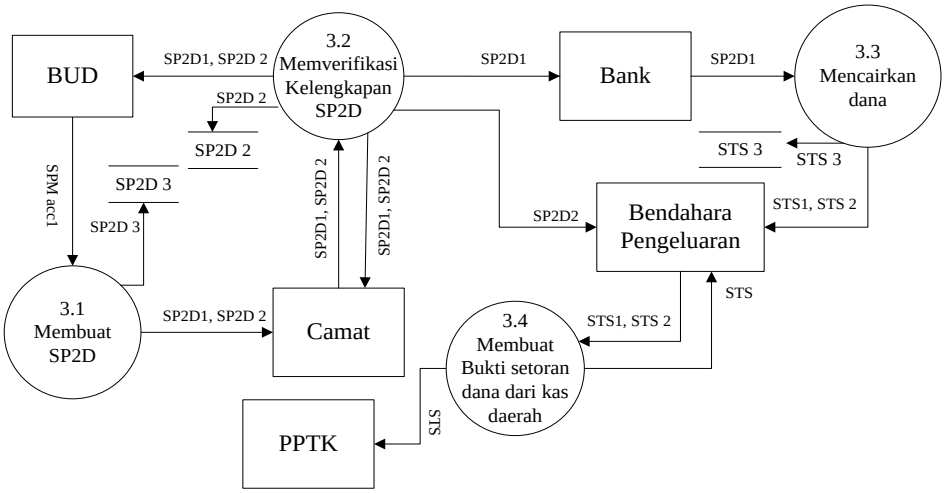
Data Flow Diagram level 2 yang diusulkan diantaranya meliputi penjabaran tentang proses proses pengajuan anggaran yang dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 4.4 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 2 sistem diusulkan

4.2.1.5 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 3 sistem yang Diusulkan

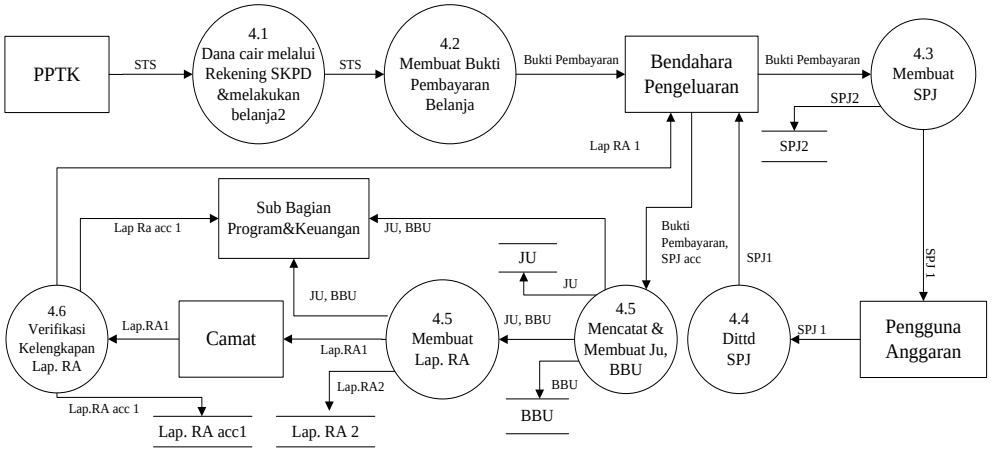
Data Flow Diagram level 3 yang diusulkan diantaranya meliputi penjabaran tentang proses merealisasikan anggaran dana yang sudah diajukan berdasarkan rencana dan pelaksanaan anggaran dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 4.5 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 3 sistem diusulkan

4.2.1.6 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 4 sistem yang Diusulkan

Data Flow Diagram level 4 yang diusulkan diantaranya meliputi penjabaran tentang proses melakukan transaksi bukti pemakaiaan/pembayaraan dana dan membuat laporan keuangan anggaran yang meliputi Jurnal Umum, Buku Besar dan Laporan Realisasi Anggaran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.6 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 4 sistem diusulkan

4.2.2 Kamus Data Yang Diusulkan

Kamus data Usulan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 4.3 Kamus Data Usulan

Kamus Data		
Nama arus data	:	Rencana Kerja Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Alias	:	RKA-SKPD
Bentuk data	:	Dokumen berupa formulir
Arus data	:	Sub Bagian Program dan Keuangan-Proses 1.0
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk perencanaan dan penggangaran
Periode	:	Setiap terjadinya perencanaan kegiatan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun sekali
Struktur data	:	No RKA, Tahun Anggaran
Kamus Data		
Nama arus data	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Alias	:	DPA
Bentuk data	:	Dokumen berupa formulir
Arus data	:	Pengguna Anggaran -Proses 1.0
		Proses 1.0- Sub Bagian Program dan Keuangan
Penjelasan	:	Dokumen sebagai pelaksanaan anggaran
Periode	:	Setiap kali terjadi pelaksanaan anggaran
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun sekali
Struktur data	:	No DPA, Tahun Anggaran
Kamus Data		
Nama arus data	:	SPD
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen
Arus data	:	BUD-Proses 1.0
		Proses 1.0-Bendahara Pengeluaran
Penjelasan	:	Dokumen untuk menyediaakan dana anggaran
Periode	:	Setiap terjadi pelaksanaan penyediaan dana
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun adalah 4 kali
Struktur data	:	No.SPP, Tahun Anggaran
Kamus Data		
Nama arus data	:	SPP-SP
Alias	:	
Bentuk data	:	Dokumen
Arus data	:	Bendahara Pengeluaran-Proses 1.0
		Proses 1.0-Sub Bagian Program dan Keuangan
Penjelasan	:	Dokumen yang dibuat untuk perintah permintaan pembayaran
Periode	:	Setiap terjadinya pembayaran
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun pertriwulan adalah 4 kali
Struktur data	:	No.SPP, Tahun Anggaran

Tabel 4.4 Kamus Data Usulan (Lanjutan 1)

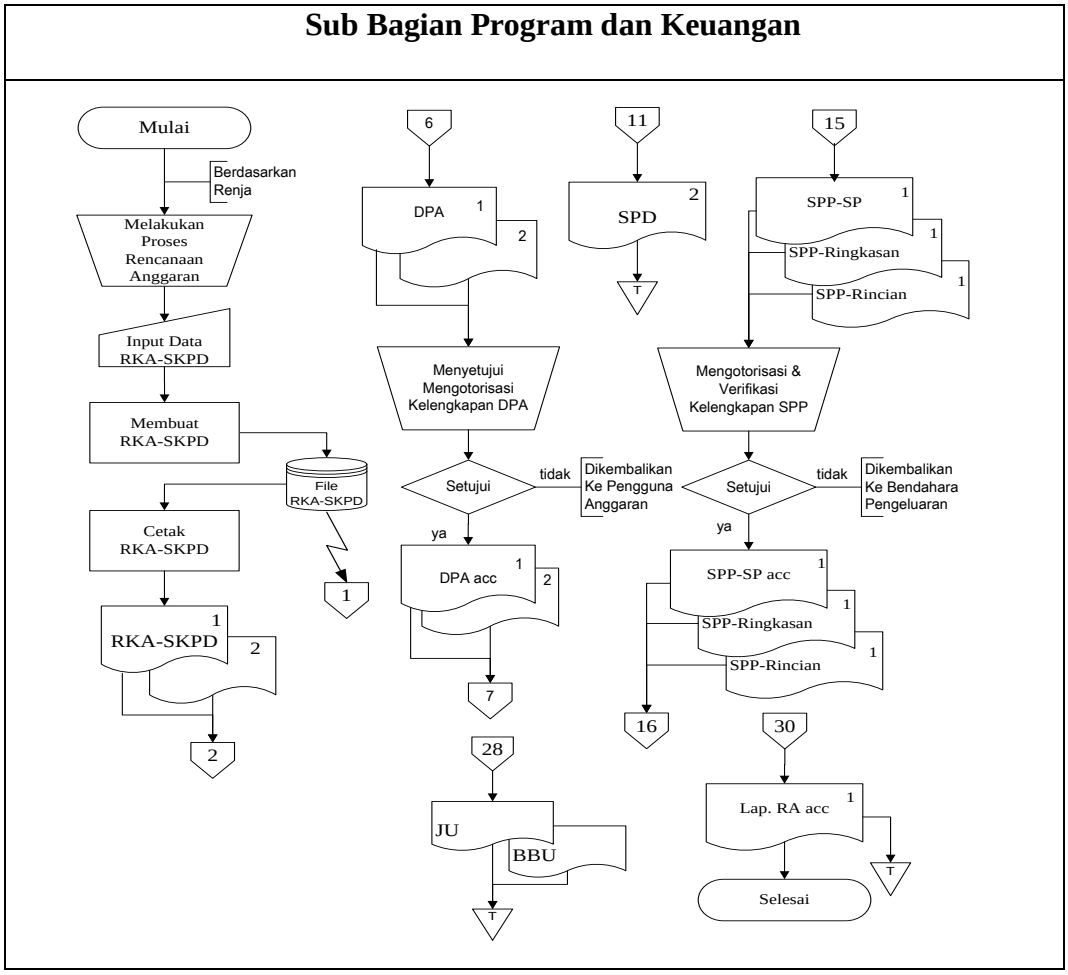
Kamus Data		
Nama arus data	:	SPP-Ring
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen
Arus data	:	Bendahara Pengeluaran-Proses 1.0 Proses 1.0-Sub Bagian Program dan Keuangan
Penjelasan	:	Dokumen yang dibuat untuk perintah permintaan pembayaran
Periode	:	Setiap terjadinya pembayaran
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun pertriwulan adalah 4 kali
Struktur data	:	No.SPP, Tahun Anggaran, No SPD, Tanggal SPD, Jumlah dana
Kamus Data		
Nama arus data	:	SPP-Rinc
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen
Arus data	:	Bendahara Pengeluaran-Proses 1.0 Proses 1.0-Sub Bagian Program dan Keuangan
Penjelasan	:	Dokumen yang dibuat untuk perintah permintaan pembayaran
Periode	:	Setiap kali terjadi pelelangan agunan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun pertriwulan adalah 4 kali
Struktur data	:	No. SPP, Tahun Anggaran, Uraian, Jumlah
Kamus Data		
Nama arus data	:	SPM
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen
Arus data	:	Bendahara Pengeluaran-Proses 2.0 Proses 2.0-PPK-SKPD
Penjelasan	:	Dokumen untuk penatausahaan pengeluaran permintaan membayar
Periode	:	Setiap terjadi pelaksanaan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun adalah 1 kali
Struktur data	:	No. SPM, Tahun Anggara, SKPD, No. Rek Bank, Dasar Pembayaran
Kamus Data		
Nama arus data	:	SP2D
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen
Arus data	:	BUD-Proses 2.0 Proses 2.0-Sub Camat
Penjelasan	:	Dokumen yang dibuat untuk perintah pencairan dana
Periode	:	Setiap terjadinya pencaian dana
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun adalah 1 kali
Struktur data	:	No.SP2D, Tahun Anggaran, Tanggal, No SPM, SKPD, Kepada

Tabel 4.5 Kamus Data Berjalan (Lanjutan 2)

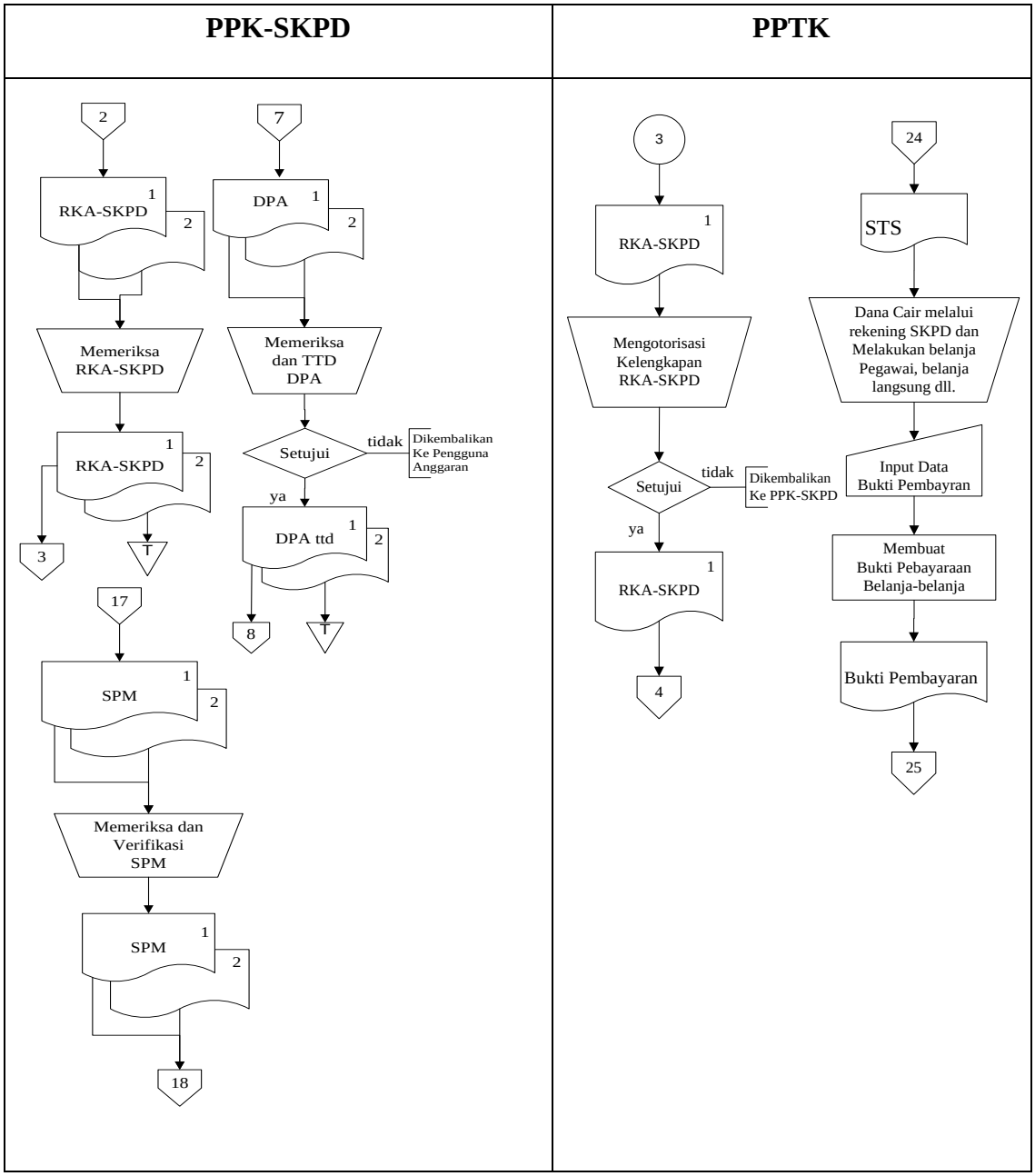
Kamus Data		
Nama arus data	:	STS
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus data	:	Bank-Proses 3.0 Proses 3.0-PPTK
Penjelasan	:	Dokumen yang dibuat oleh bank sebagai tanda bukti setor dana
Periode	:	Setiap terjadinya pencairan
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu kali
Struktur data	:	No STS, Tanggal, Tahun, Jumlah
Kamus Data		
Nama arus data	:	SPJ
Alias	:	-
Bentuk data	:	Dokumen
Arus data	:	Bendahara Pengeluaran-Proses 4.0 Proses 4.0-Pengguna Anggaran
Penjelasan	:	Dokumen yang dibuat untuk laporan pertanggung jawaban
Periode	:	Setiap terjadi transaksi
Volume	:	Volume rata-rata tiap satu tahun pertriwulan adalah 4 kali
Struktur data	:	No SPJ, Tahun

4.2.3 Bagan Aliran Sistem yang Diusulkan

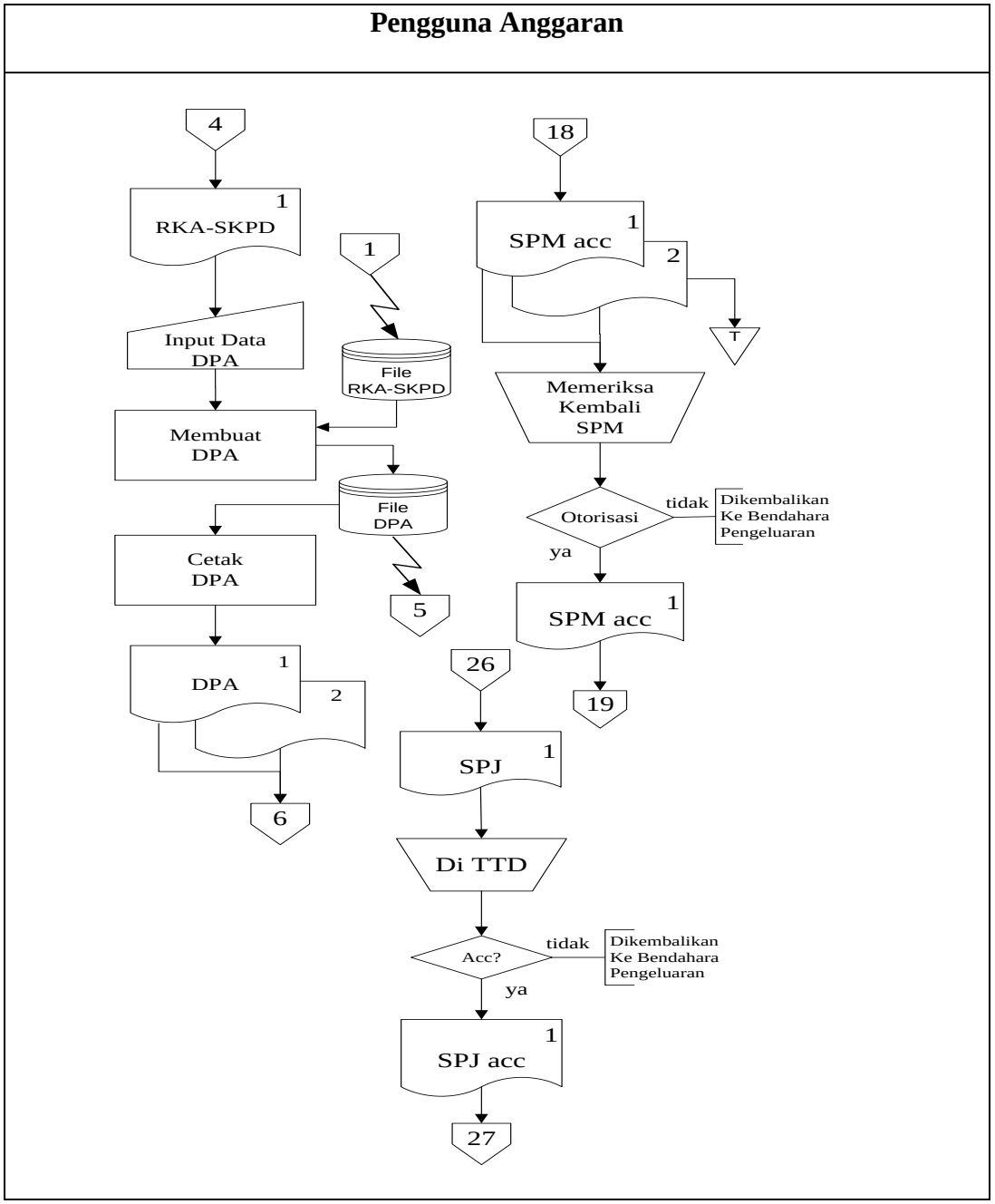
Bagan alir yang diusulkan terdiri dari Pengguna Anggaran, Sub Bagian Program dan Keuangan, PPTK, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, BUD, Camat dan Bank. Bagan alir yang diusulkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



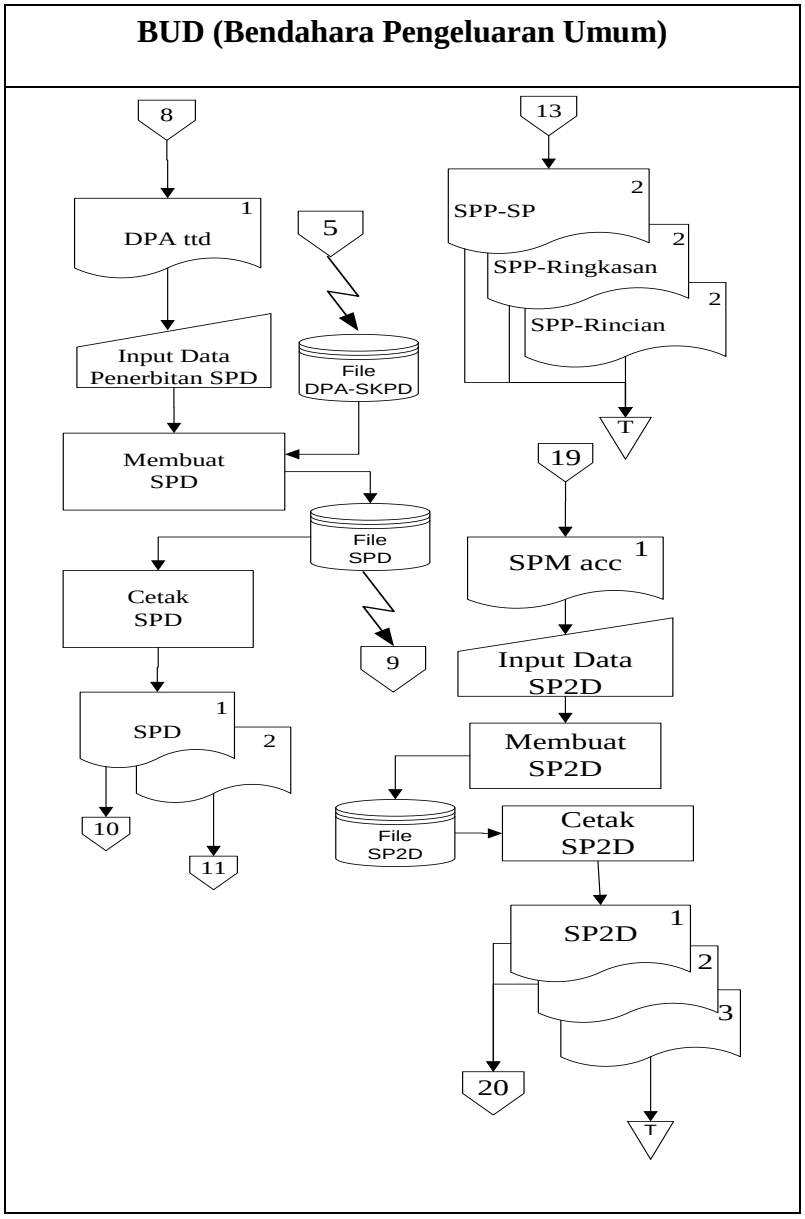
Gambar 4.7 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran yang Usulan Pada Kantor Kecamatan Rancasari (1)



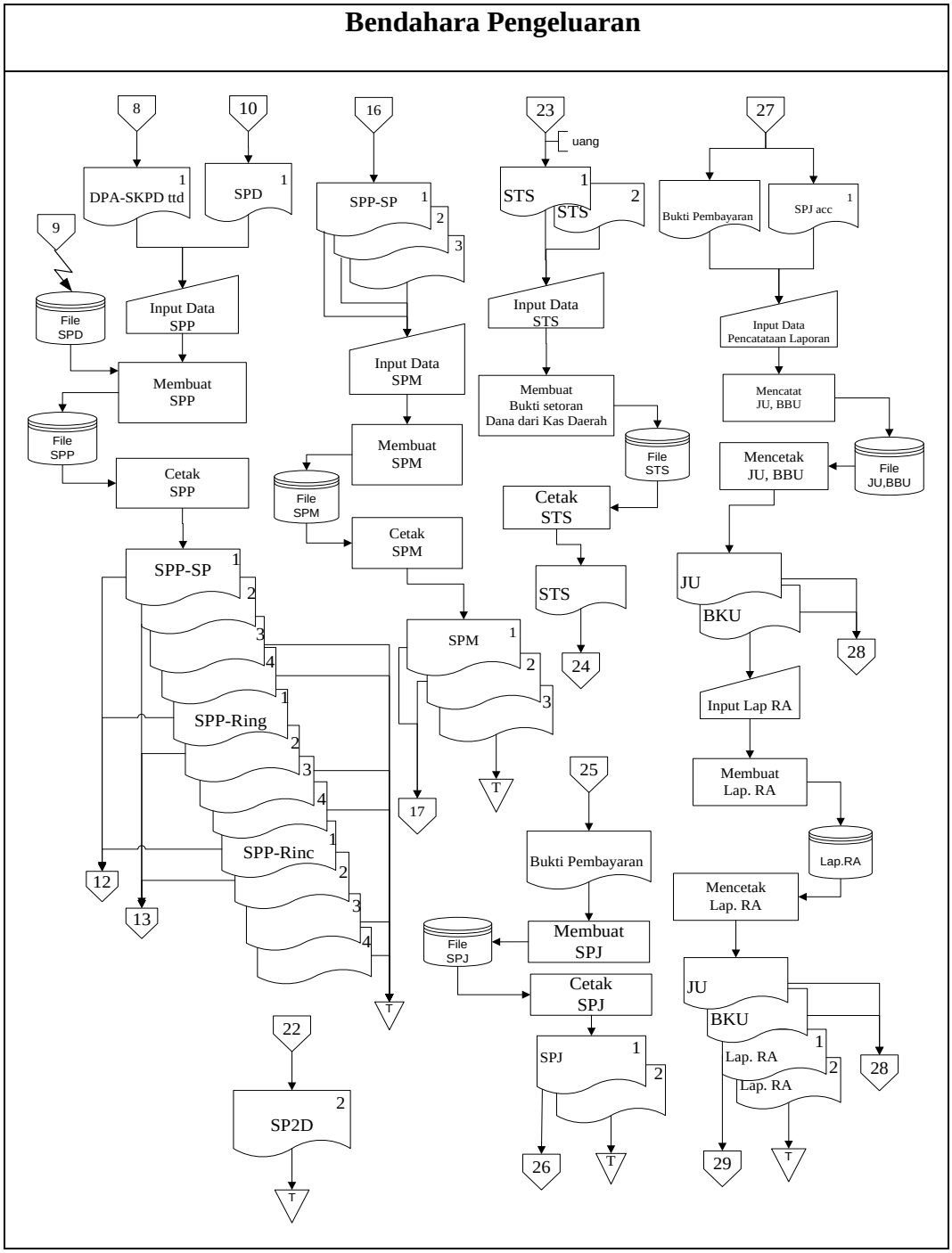
Gambar 4.8 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran yang Usulan Pada Kantor Kecamatan Rancasari Lanjutan (2)



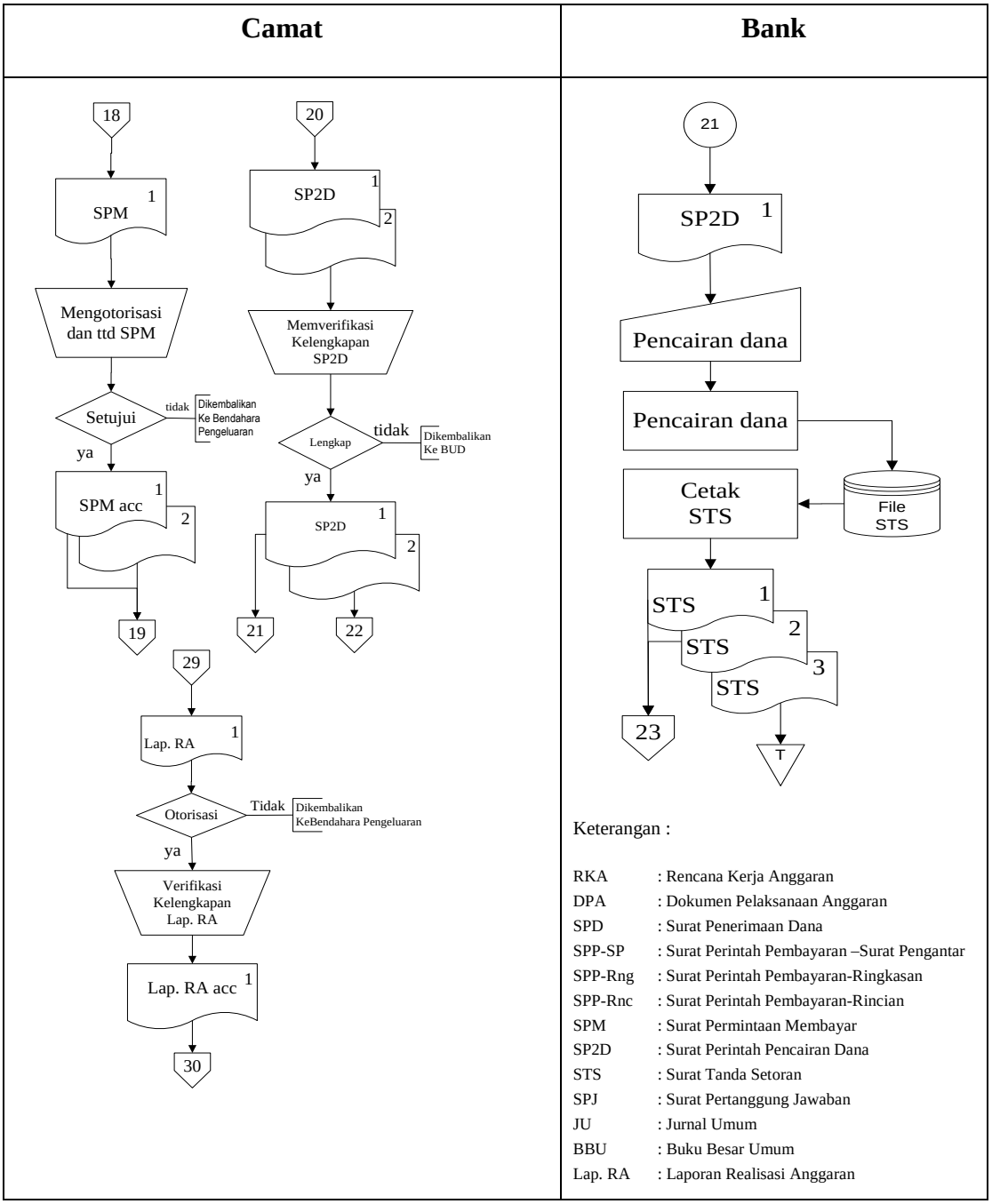
Gambar 4.9 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran yang Usulan Pada Kantor Kecamatan Rancasari (3)



Gambar 4.10 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran yang Usulan Pada Kantor Kecamatan Rancasari (4)



Gambar 4.11 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran yang Usulan Pada Kantor Kecamatan Rancasari (5)



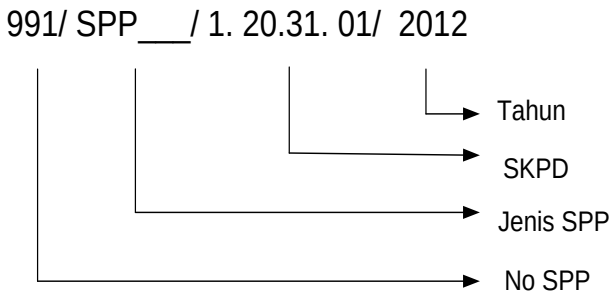
Gambar 4.12 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran yang Usulan Pada Kantor Kecamatan Rancasari (6)

4.2.4 Perancangan Basis Data

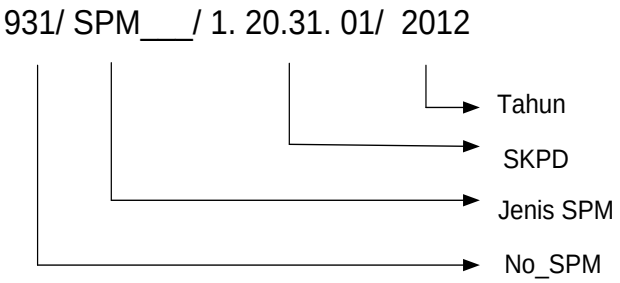
4.2.4.1 Kode Pada Kunci Utama

Adapun perancangan untuk pengkodean yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

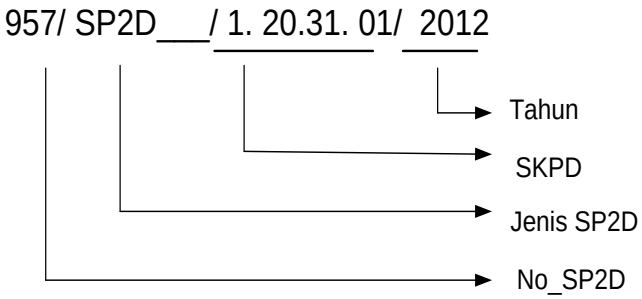
A. Kode Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



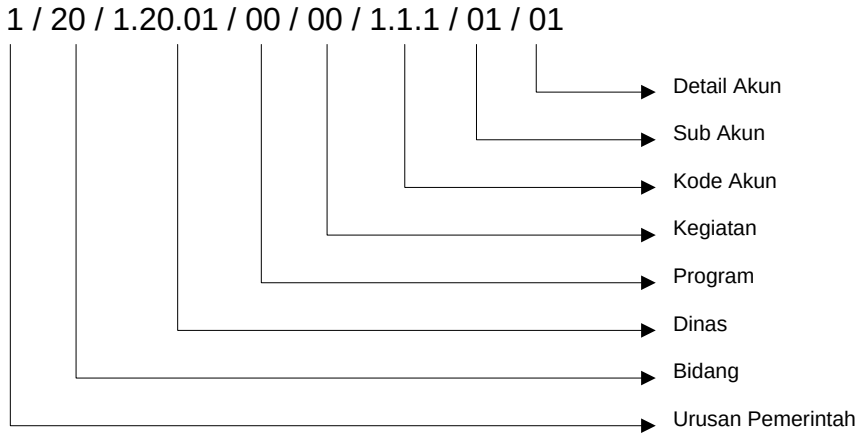
B. Kode Surat Perintah Membayar (SPM)



C. Kode Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



D. Kode Rekening



4.2.4.2 Normalisasi Yang Diusulkan

Adapun beberapa dokumen yang merupakan inputan dan harus dilakukan normalisasi, dan penulis mengusulkan normalisasi dokumen-dokumen yang ada dibawah ini, diantaranya sebagai berikut ini:



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : **991/064/LS/1.20.31.01/2009**
Tahun **2009**

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD **Kecamatan Rancasari**
Di Tempat

Dengan memperhatikan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG Nomor 190 TAHUN 2009, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan	:	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
b. SKPD	:	1.20.31.01	Kecamatan Rancasari
c. Tahun Anggaran	:	2009	
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor	:	924/273/BTL/III/1.20.31.01/2009	
e. Jumlah Sisa Dana SPD	:	Rp. 387.756.295,00 (terbilang : *Tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*)	
f. Untuk Keperluan	:	Pembayaran Gaji &TunjanganGol III & IV Bulan Oktober 2009 kepada 35 orang pegawai/97 jiwa	
g. Nama Bendahara Pengeluaran	:	Eni Rohaeni	
h. Jumlah Pembayaran Yang Diminta	:	Rp. 107.290.125,00 (terbilang : *Seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah*)	
i. Nama dan Nomor Rekening Bank	:	BANK JABAR Cab. Taman Sari Bdg 0027.033213.001	

Bandung, 14 September 2009
Bendahara Pengeluaran

Eni Rohaeni

Gambar 4.13 Dokumen SPP-Surat Pengantar

Tabel 4.6 SPP-Surat Pengantar dalam bentuk *Unnormal*

No SPP	Urusan Pemerintahan	SKPD	Tahun Anggaran	Dasar Pengeluaran SPD No	Jumlah Sisa Dana SPD	Untuk Keperluan	Nama Bendahara Pengeluaran	Jumlah Pembayaran Yang Diminta	Nama No Rekening Bank
991/064/LS/2009	Urusan Wajib Pemerintahan	Kecamatan Rancasari	2009	924/273/BTL/III/2009	Rp. 387.756.295	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Eni Rohaeni	Rp. 107.290.125	Bank Jabar 0027.0333213.001

Tabel 4.7 SPP-Surat Pengantar dalam bentuk Normal ke satu (1-NF)

No SPP	Urusan Pemerintahan	SKPD	Tahun Anggaran	Dasar Pengeluaran SPD No	Jumlah Sisa Dana SPD	Untuk Keperluan	Nama Bendahara Pengeluaran	Jumlah Pembayaran Yang Diminta	Nama No Rekening Bank
991/064/LS/2009	Urusan Wajib Pemerintahan	Kecamatan Rancasari	2009	924/273/BTL/III/2009	Rp. 387.756.295	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Eni Rohaeni	Rp. 107.290.125	Bank Jabar 0027.0333213.001

Tabel 4.8 SPP-Surat Pengantar dalam bentuk Normal ke dua (2-NF)
Relasi SPP-SP

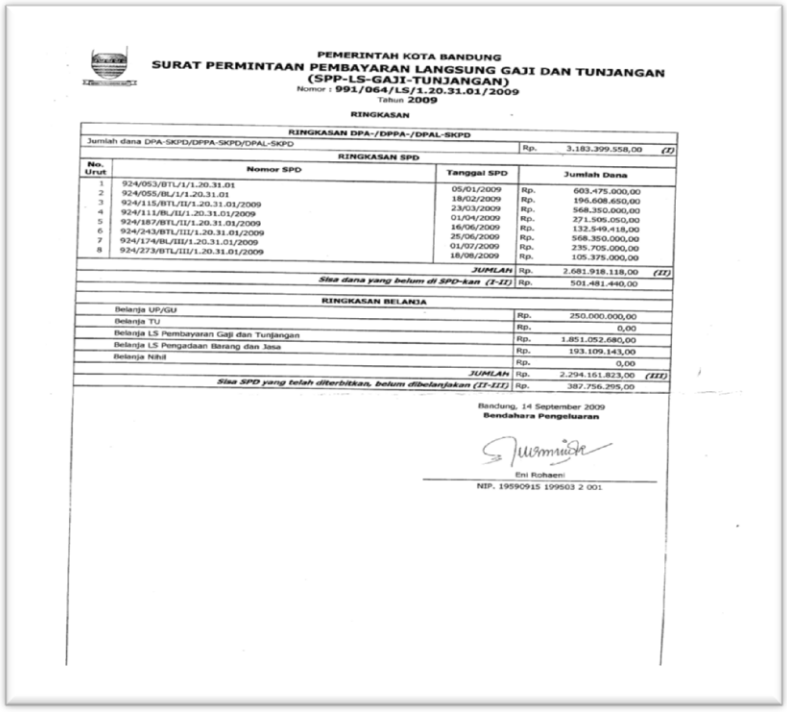
No SPP	Urusan Pemerintahan	SKPD	Tahun Anggaran	Dasar Pengeluaran SPD No	Jumlah Sisa Dana SPD	Untuk Keperluan
991/064/LS/2009	Urusan Wajib Pemerintahan	Kecamatan Rancasari	2009	924/273/BTL/III/2009	Rp. 387.756.295	Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Tabel 4.9 Relasi Pegawai

SKPD	Nama Bendahara Pengeluaran	Nama No Rekening Bank
Kecamatan Rancasari	Eni Rohaeni	Bank Jabar 0027.0333213.001

Tabel 4.10 Relasi SPD

Dasar Pengeluaran SPD No	Jumlah Sisa Dana SPD
924/273/BTL/III/2009	Rp. 387.756.295



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : **991/064/LS/1.20.31.01/2009**
Tahun **2009**

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	Rp.	3.183.399.558,00	(I)

RINGKASAN SPD

No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD		Jumlah Dana
1	924/053/BTL/1/1.20.31.01	05/01/2009	Rp.	603.475.000,00
2	924/055/BL/1/1.20.31.01	18/02/2009	Rp.	196.608.650,00
3	924/115/BTL/II/1.20.31.01/2009	23/03/2009	Rp.	568.350.000,00
4	924/111/BL/II/1.20.31.01/2009	01/04/2009	Rp.	271.505.050,00
5	924/187/BTL/II/1.20.31.01/2009	16/06/2009	Rp.	132.549.418,00
6	924/243/BTL/III/1.20.31.01/2009	25/06/2009	Rp.	568.350.000,00
7	924/174/BL/III/1.20.31.01/2009	01/07/2009	Rp.	235.705.000,00
8	924/273/BTL/III/1.20.31.01/2009	18/08/2009	Rp.	105.375.000,00
		JUMLAH	Rp.	2.681.918.118,00 (II)
		Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)	Rp.	501.481.440,00

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU	Rp.	250.000.000,00
Belanja TU	Rp.	0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp.	1.851.052.680,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	193.109.143,00
Belanja Nihil	Rp.	0,00
JUMLAH	Rp.	2.294.161.823,00 (III)
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp.	387.756.295,00

Bandung, 14 September 2009
Bendahara Pengeluaran

Eni Rohaeni
NIP. 19590915 199503 2 001

Gambar 4.14 Dokumen SPP- Ringkasan

Tabel 4.11 SPP- Ringkasan dalam bentuk *Unnormal*

No SPP	Jumlah Dana DPA	No Urut	No SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana	Jumlah	Sisa Dana Yang Belum di SPD-kan	Belanja UP/GU	Belanja TU	Belanja LS Pembayaran Gaji &Tunjangan	Belanja LS Pengadaan Barang & Jasa	Belanja Nihil	Jumlah	Sisa SPD
991/064/LS/2009	Rp. 3.183.399.558,00	1	924/053/BTL/1.20.31.01	5/1/2009	Rp.603.475.000,00	Rp. 2.681.918.118,00	Rp. 501.481.440,00	RP. 250.000.000,00	0	Rp. 1.851.052.680,00	Rp. 193.109.143,00	0	Rp. 2.294.161.823,00	Rp. 387.756.295,00
		2	924/055/BL/1/1.20.31.01	18/02/2009	Rp. 196.608.650,00	Rp. 2.681.918.118,00	Rp. 501.481.440,00							
		3	924/115/BTL/1.20.31.012009	23/03/2009	Rp. 568.350.000,00	Rp. 2.681.918.118,00	Rp. 501.481.440,00							

Tabel 4.12 SPP- Ringkasan dalam bentuk Normal ke satu (1-NF)

No SPP	Jumlah Dana DPA	No Urut	No SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana	Jumlah	Sisa Dana Yang Belum di SPD-kan	Belanja UP/GU	Belanja TU	Belanja LS Pembayaran Gaji &Tunjangan	Belanja LS Pengadaan Barang & Jasa	Belanja Nihil	Jumlah	Sisa SPD
991/064/LS/2009	Rp. 3.183.399.558,00	1	924/053/BTL/1.20.31.01	5/1/2009	Rp.603.475.000,00	Rp. 2.681.918.118,00	Rp. 501.481.440,00	RP. 250.000.000,00	Rp.	Rp. 1.851.052.680,00	Rp. 193.109.143,00	Rp.	Rp. 2.294.161.823,00	Rp. 387.756.295,00
991/064/LS/2009	Rp. 3.183.399.558,00	2	924/055/BL/1/1.20.31.01	18/02/2009	Rp. 196.608.650,00	Rp. 2.681.918.118,00	Rp. 501.481.440,00	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp. 2.294.161.823,00	Rp. 387.756.295,00
991/064/LS/2009	Rp. 3.183.399.558,00	3	924/115/BTL/1.20.31.012009	23/03/2009	Rp. 568.350.000,00	Rp. 2.681.918.118,00	Rp. 501.481.440,00	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp. 2.294.161.823,00	Rp. 387.756.295,00

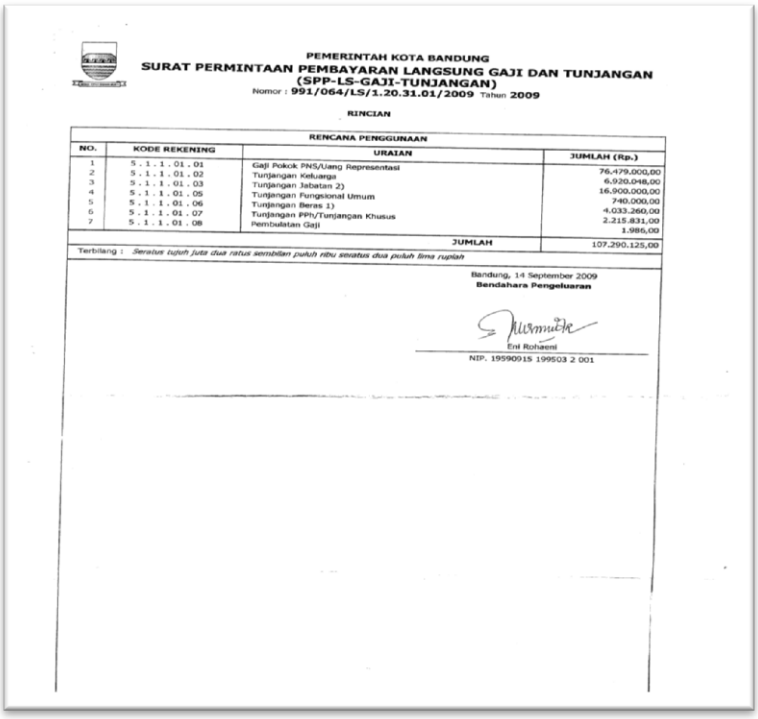
Tabel 4.13 SPP- Ringkasan dalam bentuk Normal ke dua (2-NF)

Relasi SPP-Ringkasan

No SPP	Jumlah Dana DPA	No SPD	Belanja UP/GU	Belanja TU	Belanja LS Pembayaran Gaji &Tunjangan	Belanja LS Pengadaan Barang & Jasa	Jumlah	Sisa SPD
991/064/LS/2009	Rp. 3.183.399.558,00	924/053/BTL/1.20.31.01	RP. 250.000.000,00	Rp.	Rp. 1.851.052.680,00	Rp. 193.109.143,00	Rp. 2.294.161.823,00	Rp. 387.756.295,00
991/064/LS/2009	Rp. 3.183.399.558,00	924/055/BL/1/1.20.31.01	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp. 2.294.161.823,00	Rp. 387.756.295,00
991/064/LS/2009	Rp. 3.183.399.558,00	924/115/BTL/1.20.31.012009	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp. 2.294.161.823,00	Rp. 387.756.295,00

Tabel 4.14 Relasi SPD

No Urut	No SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana	Jumlah	Sisa Dana Yang Belum di SPD-kan
1	924/053/BTL/1.20.31.01	5/1/2009	Rp.603.475.000,00	Rp. 2.681.918.118,00	Rp. 501.481.440,00
2	924/055/BL/1/1.20.31.01	18/02/2009	Rp. 198.608.650,00	Rp. 2.681.918.118,00	Rp.
3	924/115/BTL/1.20.31.012009	23/03/2009	Rp. 568.350.000,00	Rp.	Rp.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : 991/064/LS/1.20.31.01/2009 Tahun 2009

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	76.479.000,00
2	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	6.920.048,00
3	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	16.900.000,00
4	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	740.000,00
5	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	4.033.260,00
6	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.215.831,00
7	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.986,00
		JUMLAH	107.290.125,00

Terbilang : *Seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah*

Bandung, 14 September 2009
Bendahara Pengeluaran

Eni Rohaeni
NIP. 19590915 199503 2 001

Gambar 4.15 Dokumen SPP-Rincian

Tabel 4.15 SPP- Rincian dalam bentuk *Unnormal*

No SPP	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
991/064/LS/2009	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	Rp. 76.479.000,00
	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	Rp. 6.920.048,00
	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	Rp. 16.900.000,00
	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 740.000,00
	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	Rp. 4.033.000,00
	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. 2.215.831,00
	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	Rp. 1.986,00

Tabel 4.16 SPP- Rincian dalam bentuk Normal ke satu (1-NF)

No SPP	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
991/064/LS/2009	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	Rp. 76.479.000,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	Rp. 6.920.048,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	Rp. 16.900.000,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 740.000,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	Rp. 4.033.000,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. 2.215.831,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	Rp. 1.986,00

Tabel 4.17 SPP- Rincian dalam bentuk Normal ke dua (2-NF)

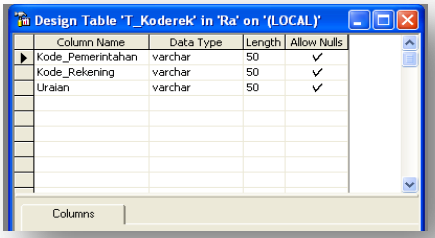
No SPP	Kode Rekening	Jumlah
991/064/LS/2009	5.1.1.01.01	Rp. 76.479.000,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.02	Rp. 6.920.048,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.03	Rp. 16.900.000,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.05	Rp. 740.000,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.06	Rp. 4.033.000,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.07	Rp. 2.215.831,00
991/064/LS/2009	5.1.1.01.08	Rp. 1.986,00

Tabel 4.18 Relasi Kode Rekening

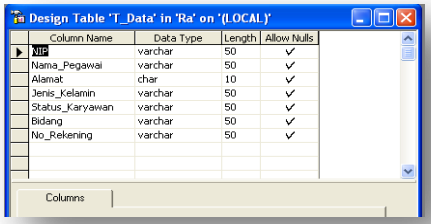
Kode Rekening	Uraian
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji

4.2.4.3 Perancangan Struktur Menu Tabel

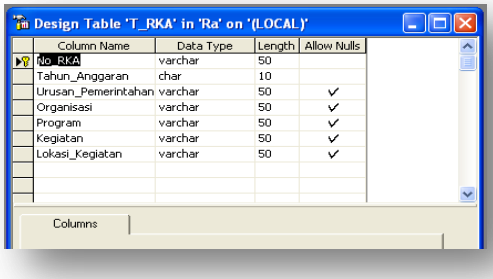
Perancangan struktur tabel adalah salah satu hal yang paling penting sebelum merancang program. Perancangan struktur tabel dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



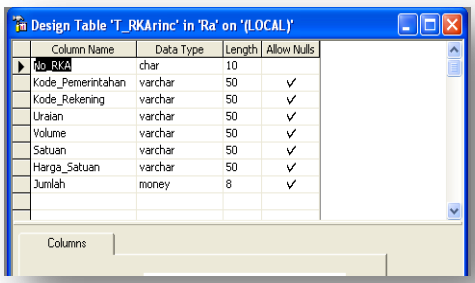
Gambar 4.16 Struktur Tabel Kode Rekening (T_Koderek)



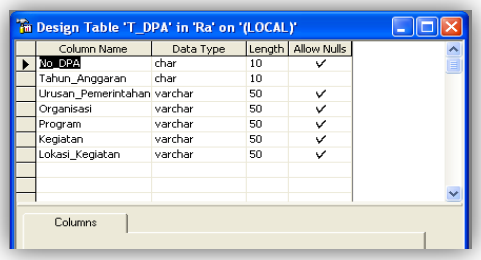
Gambar 4.17 Struktur Tabel Data Pegawai (T_Data)



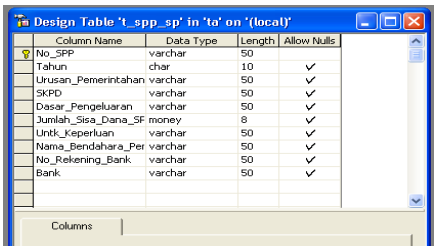
Gambar 4.18 Struktur Tabel Rencana Kerja Anggaran (T_RKA)



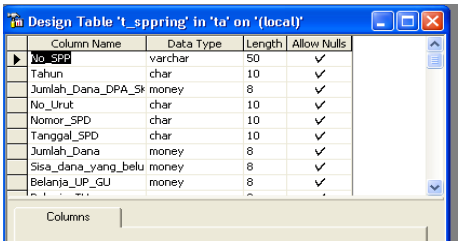
Gambar 4.19 Struktur Tabel Rencana Kerja Anggaran (T_RKArinc)



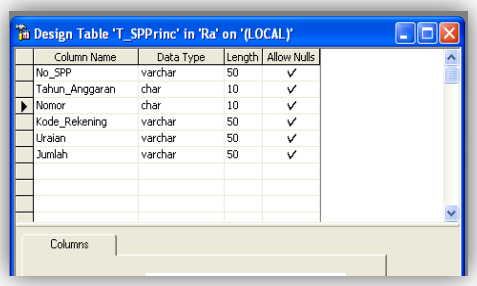
Gambar 4.20 Struktur Tabel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (T_DPA)



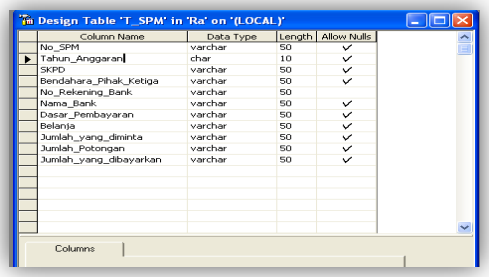
Gambar 4.21 Struktur Tabel Surat Permintaan Pembayaran (T_SPP_SP)



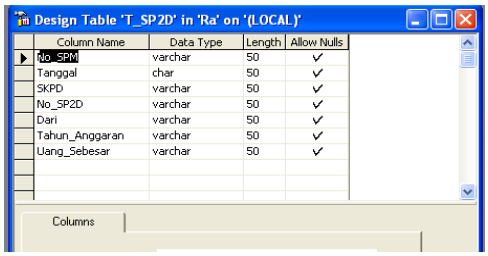
Gambar 4.22 Struktur Tabel Surat Permintaan Pembayaran (T_SPPring)



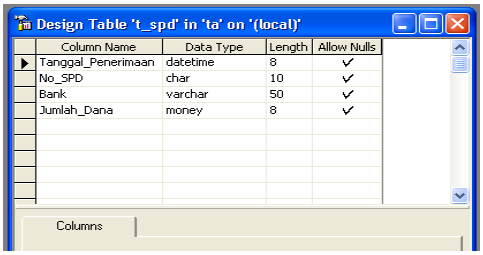
Gambar 4.23 Struktur Tabel Surat Permintaan Pembayaran (T_SPPrinc)



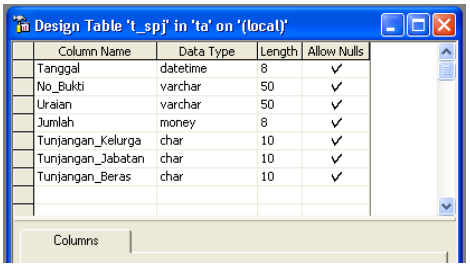
Gambar 4.24 Struktur Tabel Surat Perintah Membayar (T_SPM)



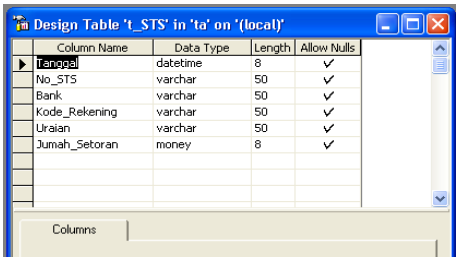
Gambar 4.25 Struktur Tabel Surat Perintah Pencairan Dana (T_SP2D)



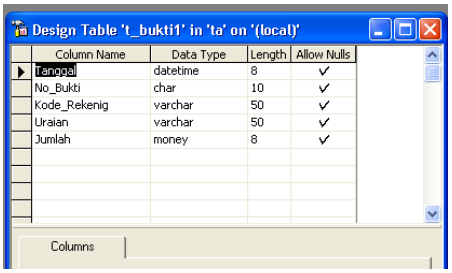
Gambar 4.26 Struktur Tabel Surat Penerimaan Dana (T_SPD)



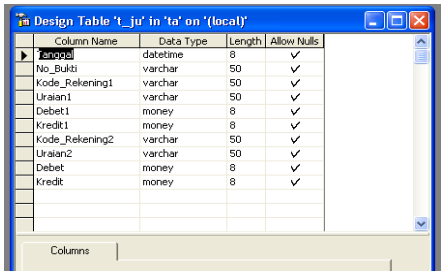
Gambar 4.27 Struktur Tabel Surat Pertanggungjawaban (T_SPJ)



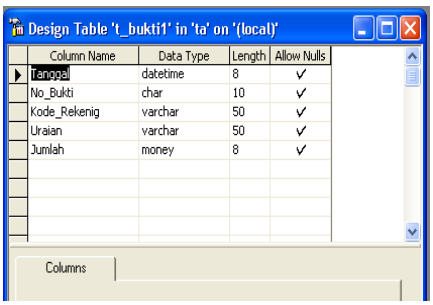
Gambar 4.28 Struktur Surat Tanda Setoran (T_STS)



Gambar 4.29 Struktur Tabel Bukti Pembayaran (T_bukti)



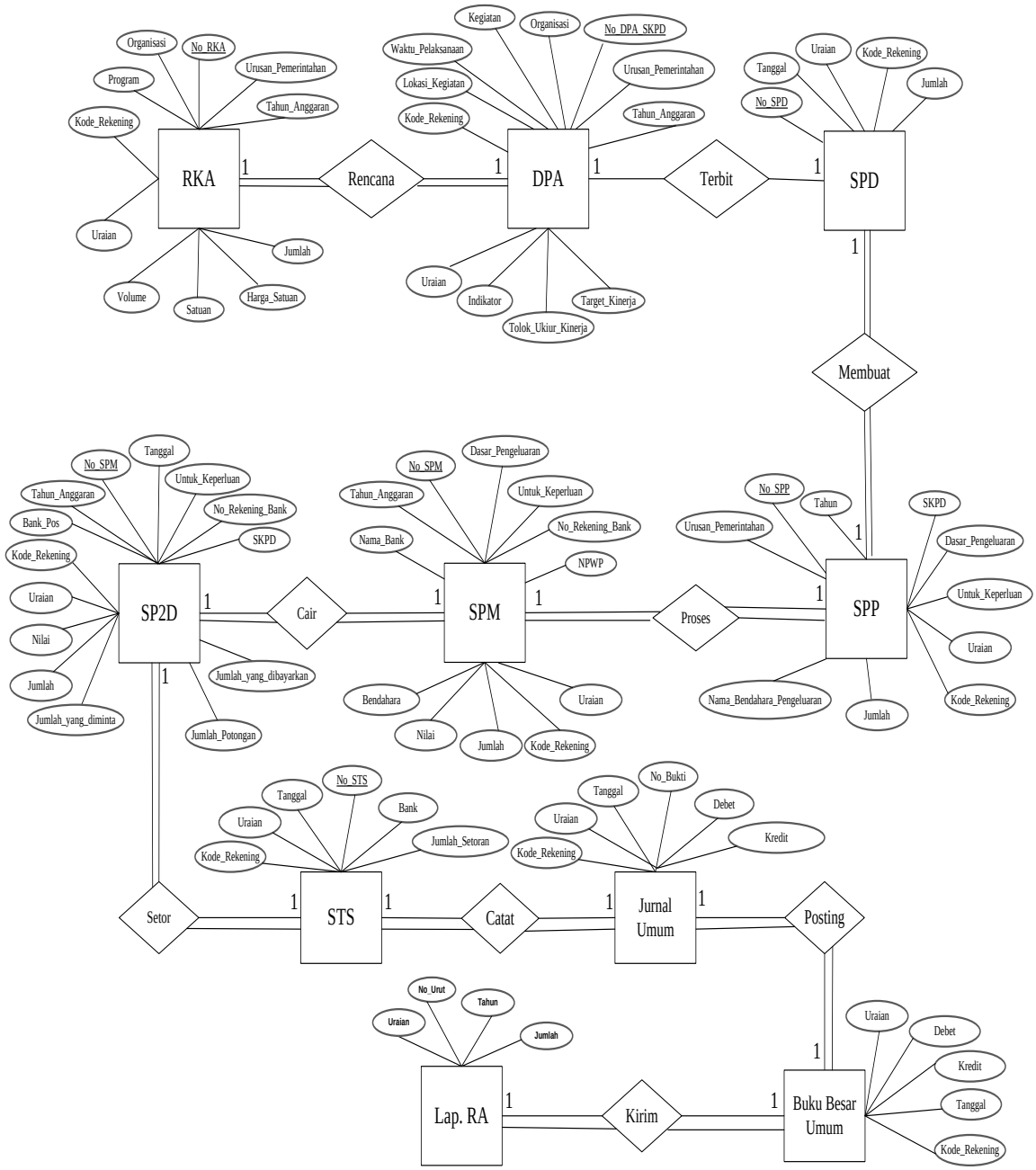
Gambar 4.30 Struktur Tabel Jurnal (T_Jurnal)



Gambar 4.31 Struktur Tabel Buku Besar Umum (T_bb)

4.2.4.4 Diagram Relasi Entitas (*Entity Relationship Diagram*) yang Diusulkan

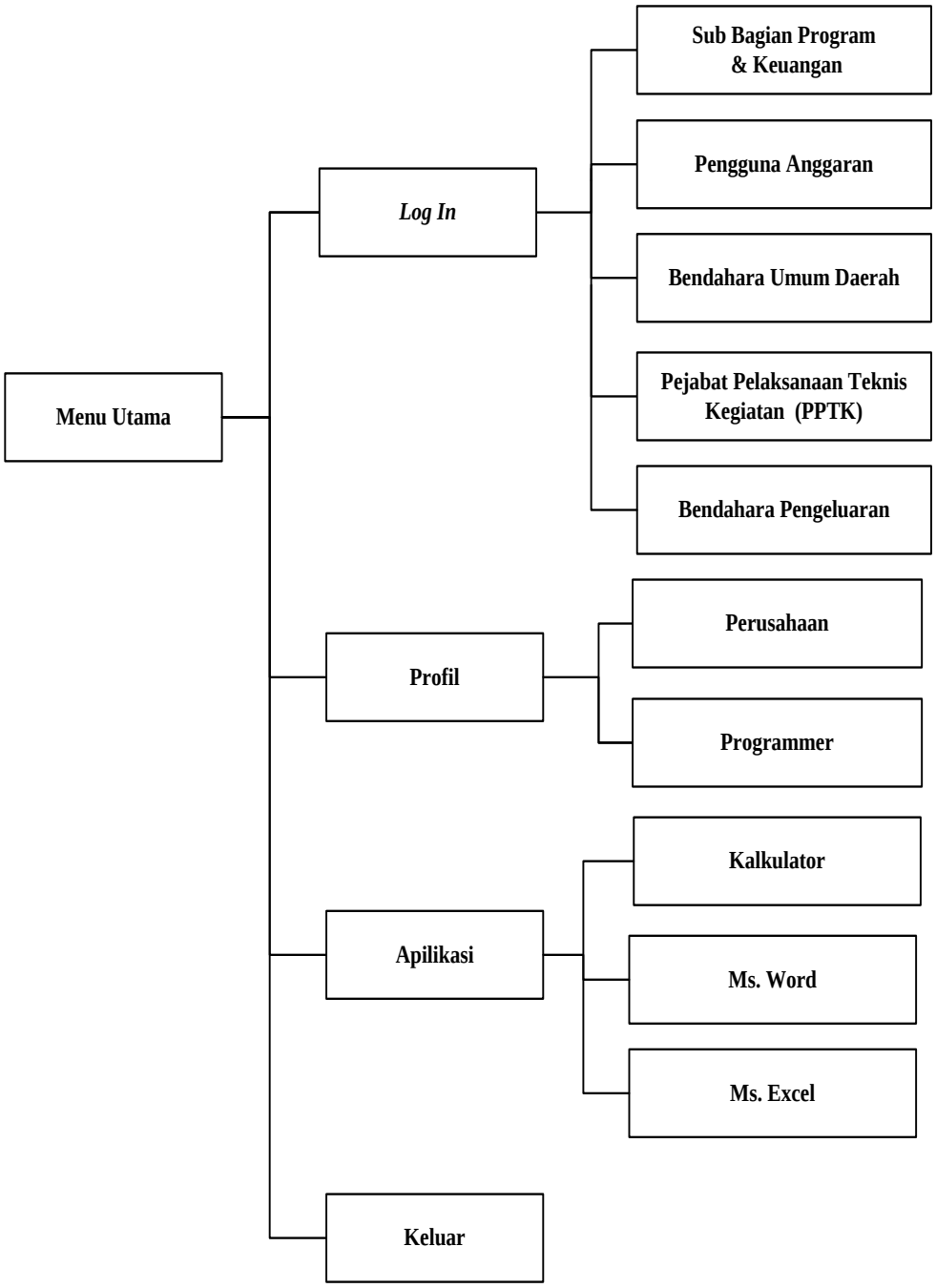
Entity Relationship Diagram yang diusulkan pada sistem informasi akuntansi realisasi anggaran adalah sebagai berikut:



Gambar 4.32 *Entity Relationship Diagram* yang Diusulkan

4.3 Perancangan Struktur Menu

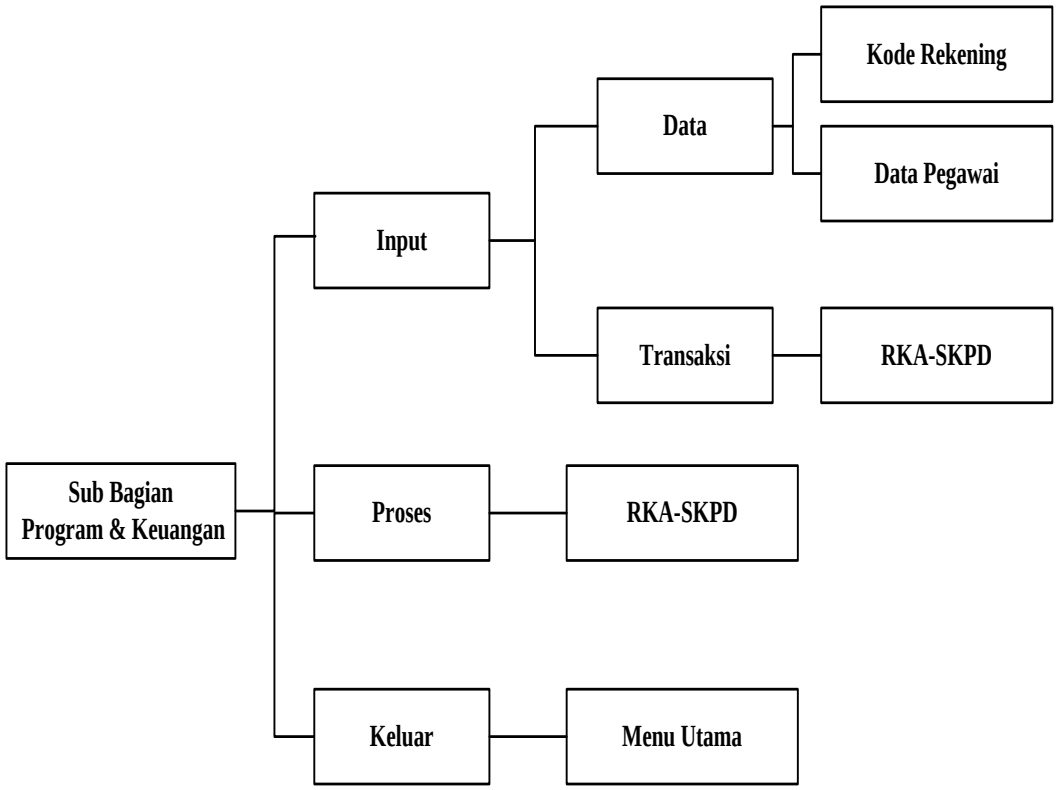
Perancangan struktur menu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.33 Struktur Menu Program

4.3.1 Struktur Menu Pada Bagian Sub Bagian Program dan Keuangan

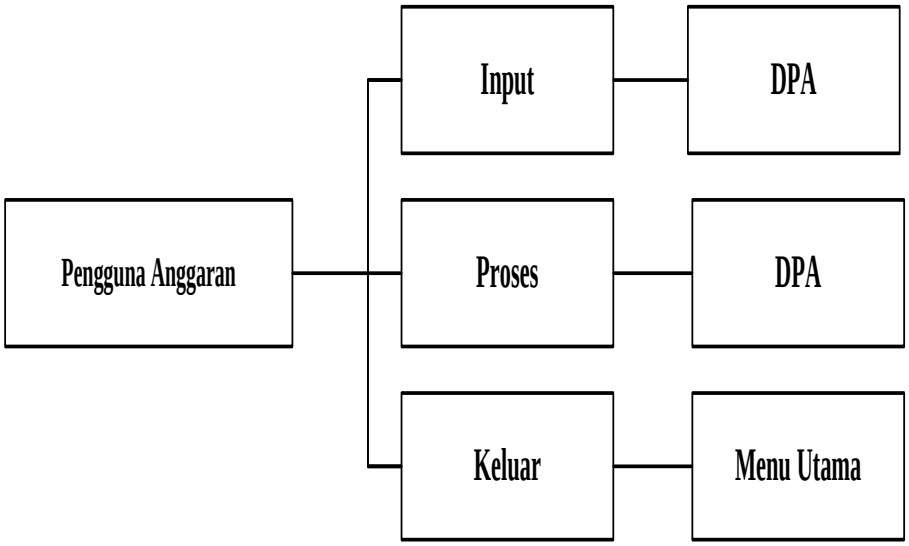
Perancangan struktur menu Pada Sub Bagian Program dan Keuangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.34 Struktur Menu Program pada Sub Bagian Program dan Keuangan

4.3.2 Struktur Menu Pada Bagian Pengguna Anggaran

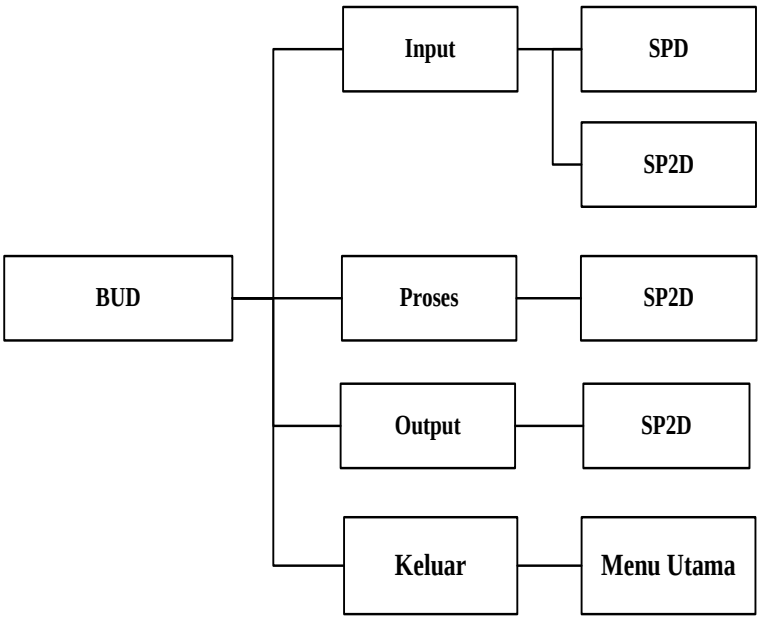
Perancangan struktur menu Pada Pengguna Anggaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.35 Struktur Menu Program pada Pengguna Anggaran

4.3.3 Struktur Menu Pada Bagian Bendahara Umum Daerah (BUD)

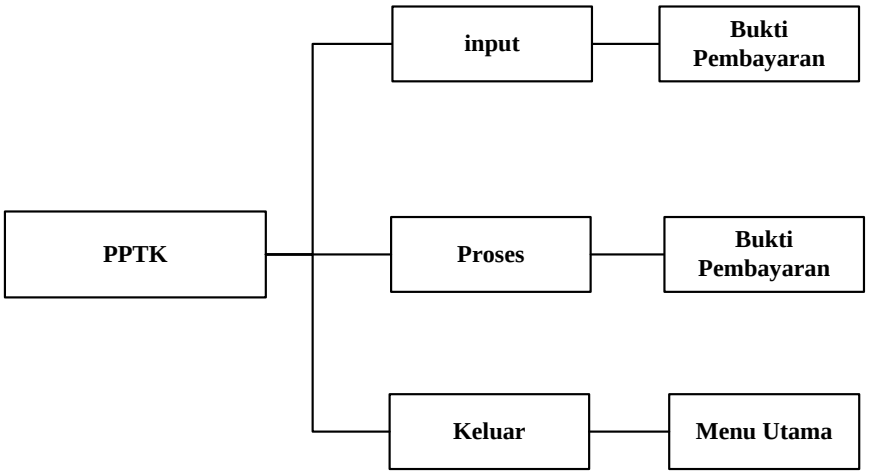
Perancangan struktur menu Pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.36 Struktur Menu Program pada Bendahara Umum Daerah (BUD)

4.3.4 Struktur Menu Pada PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan)

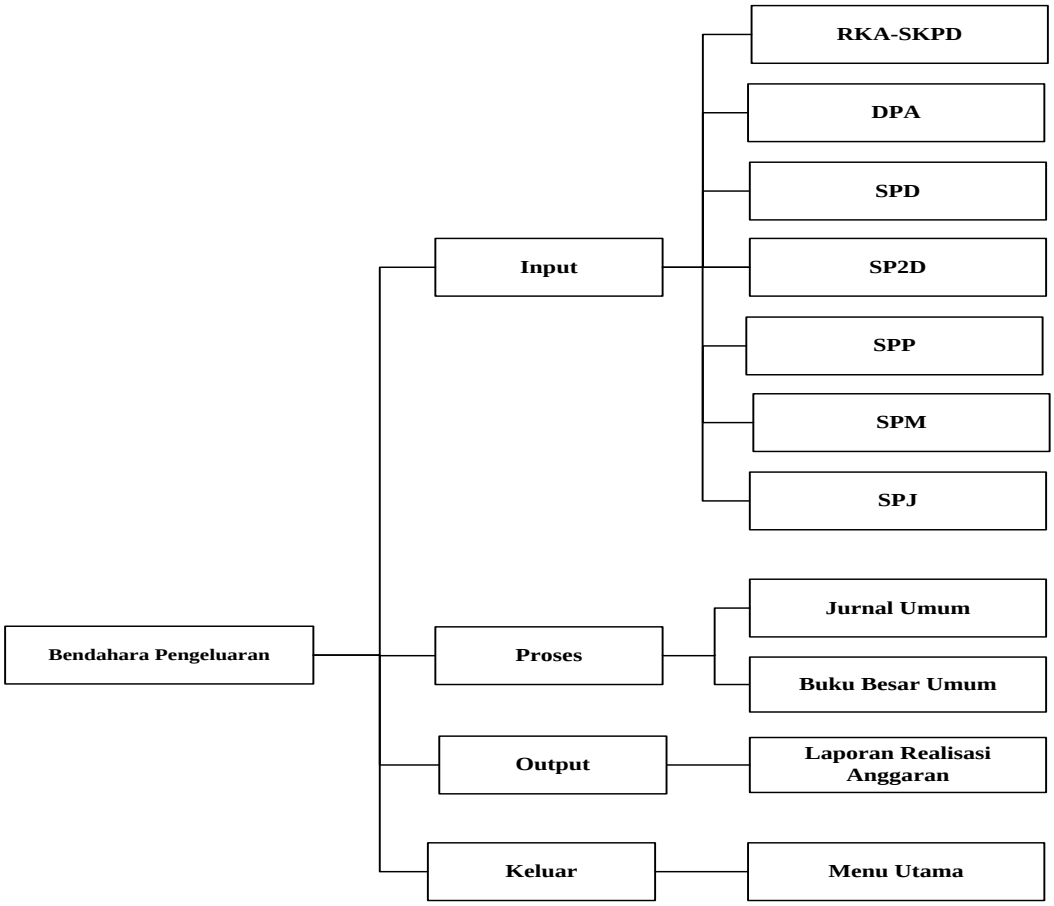
Perancangan struktur menu Pada PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.37 Struktur Menu Program pada PPTK
(Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan)

4.3.5 Struktur Menu Pada Bagian Bendahara Pengeluaran

Perancangan struktur menu Pada Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.38 Struktur Menu Program pada Bendahara Pengeluaran